



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 032/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 087/VI/REG-KI-BANTEN 2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Jl. Palem 5 No. 189 RT. 004 RW. 008 Jaka Sampurna
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Provinsi Banten
Alamat : Jl. Ki Ajurum No. 3 Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

 Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juni 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 087 VI REG-KI-BANTEN 2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 9 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan atau melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus pelanggaran;

[2.7] Pada tanggal 2 April 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat melalui media elektronik Nomor 488/46-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon perihal Jawaban atas Permohonan Informasi .

[2.8] Pada tanggal 3 April 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat pada paragraf [2.7] kepada Pemohon melalui jasa pengiriman pos.

[2.9] Pada tanggal 9 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat elektronik kepada Gubernur Provinsi Banten selaku atasan PPIID Pemerintah Provinsi Banten melalui PPIID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi tidak dipenuhi.

[2.10] Pada tanggal 22 Mei 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/61-HMSP PPIID/2012 kepada Pemohon, perihal Jawaban atas Keberatan.

[2.11] Pada tanggal 14 Agustus 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada tanggal 22 Juli 2012. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi dan menyatakan menarik diri;
2. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Karena permintaan informasi tidak dipenuhi seluruhnya (diberikan tidak lengkap).

Petitum

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

4. Daftar Black List Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012; dan
5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan.

[2.3] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/35/HMSP.PPID/2012 kepada Termohon perihal Permohonan Informasi, dalam rangka membantu Termohon untuk konsolidasi dan memfasilitasi agar Termohon memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon paling lambat 26 Maret 2012.

[2.4] Pada tanggal 19 Maret 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 460/0421/Dinsos III/2012 kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Selaku PPID Pemerintah Provinsi Banten perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang pada intinya meminta perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk pengumpulan materi yang diminta oleh Pemohon.

[2.5] Pada tanggal 20 Maret 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/4-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang pada intinya PPID pada setiap SKPD memohon PPID Pemerintah Provinsi Banten mengajukan perpanjangan waktu kepada Pemohon selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.6] Pada tanggal 30 Maret 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 800/0491-Dinsos III/2012 kepada Biro Humas dan Protokol Selaku PPID Pemerintah Provinsi Banten perihal Data Informasi Jawaban dari Sdr. Muhammad HS.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan.

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register Sengketa 087/VI/REG-KI-BANTEN 2012 gugur:

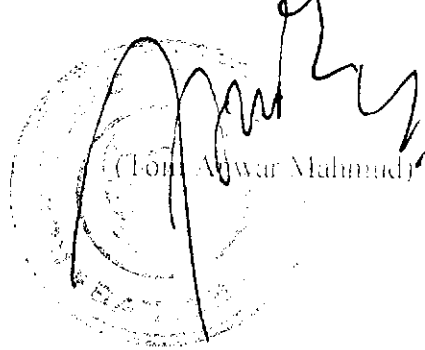
1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP;
3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

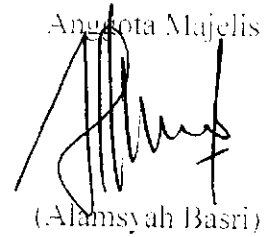
Ketua Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis


(Alamsyah Basri)

Petugas Kepaniteraan


(Jeji Refliadi)

